BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh *Allah* sebagai makhluk yang sempurna, karena manusia memiliki akal. Hidup manusia cenderung lebih maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Seluruh alam yang terbentang luas ini merupakan tugas manusia sebagai *khalifah* untuk mengelola serta melestarikannya agar dapat menunjang hidupnya. Selain itu, dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, *Allah* juga menciptakan sistem perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan bumi beserta isinya untuk kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dilengkapi dengan akal untuk berfikir dan menggunakan akalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Allah* menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam firman Allah surat *Al-Hujarat* ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :“ *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu*

disisi Allah adalah orang yang bertaqwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. Al-Hujurat Ayat : 13)¹

Untuk menyatukan keduanya Allah memberikan jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, mereka dapat menjadi pasangan dan menempuh kehidupan baru yang sah dan dibenarkan dalam syariat Islam. Perkawinan tersebut menimbulkan banyak kemaslahatan kepada kedua pasangan tersebut dengan bertambahnya keturunan, ketentraman, kerukunan dalam berumah tangga dan lainnya.

Dalam hadits Nabi dijelaskan tentang seorang pemuda yang sudah mampu dianjurkan untuk menikah.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ; فإنه له وجاء) متفق عليه

“Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat” . (Muttafaqun Alaih).²

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung, Surabaya, 2006, hlm.

² Bisri Mustofa, *Tarjamah Bulughul Maram*, Manara, Kudus, 1975, hlm. 159

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqaan Gholidzan* untuk mentaati perintah *Allah* dan melaksanakan merupakan ibadah.

Untuk melaksanakan perkawinan tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun-rukun tertentu. Diantara rukun-rukun perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, akad nikah dan dua orang saksi. Di Indonesia sendiri dalam melaksanakan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan harus mencapai umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat diharapkan bisa

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 22

mewujudkan tujuan mulia dalam rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan *Al-Quran* yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang di dalamnya menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan tempat bernaung bagi anggota keluarganya. Maka sebuah pernikahan dibutuhkan suatu pemikiran yang matang, dan juga umur yang sudah mencukupi untuk menikah.⁴

Oleh karenanya dalam perkawinan dibutuhkan kematangan dan kesiapan mental, material, maupun spritual. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, dan kewajiban agama. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis dan sosial. Bahwa dalam diri seseorang tersebut telah mampu dan siap menghadapi serta menjalani efek-efek atau pun resiko baik suka maupun duka yang timbul dari adanya perkawinan.

Karena perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia-usia tersebut sangat rentan dengan perceraian perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia memelai mencapai batas minimal usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan biasa disebut dengan perkawinan di bawah umur.⁵

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seorang pria maupun wanita, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum

⁴ *op.cit.*,

⁵ *op.cit.*,

Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶ Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Lebih lanjut KHI yang juga mengikuti aturan yang tertera dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, menentukan bahwa sekalipun sudah mencapai batas usia minimal namun jika belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua atau walinya.

Jadi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu mendapat izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian walaupun mereka telah mencapai batas minimal usia untuk kawin, jika belum memperoleh izin orang tua atau wali perkawinannya tidak bisa dilangsungkan.

Pengajuan dispensasi nikah sekarang ini justru semakin banyak dilakukan oleh anak-anak muda, seakan-akan menjadi tren anak muda untuk melakukan hal tersebut, pengajuan tersebut bukan semata-mata dikarenakan ingin segera menjalin hubungan suami istri yang sah akan

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Nuansa Aulia*, Bandung, 2011, hlm. 5

tetapi dikarenakan faktor kehamilan yang terjadi diluar nikah yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan.⁷ Dispensasi nikah juga sebagai solusi bagi para anak muda yang ingin segera menjalin perkawinan yang masih dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).

Berdasar dari latar belakang diatas, maka penyusun menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul **“STUDI TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh alasan pemilihan judul di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan-alasan yang mendasari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam mengabulkan dispensasi nikah pada tahun 2015?

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Pers, Semarang: 2014, hlm. 67

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam mengabulkan dispensasi nikah dibawah umur pada tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Peneliti

Agar peneliti dapat memahami arti pentingnya suatu penelitian sebagai sarana penghubung antara teori dengan penerapan secara nyata dalam dunia hukum.

2. Praktik Hukum

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam, terutama ilmu pengetahuan hukum perdata islam mengenai hukum studi tentang dispensasi nikah di bawah umur di PA Ambarawa.
- b. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan kepada praktisi hukum maupun kepada pemerintah sebagai pihak

yang paling utama untuk berperan dalam penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum kebenaran dan keadilan.

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, maka penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang tertera pada judul tersebut, supaya bisa dipahami dan tidak ada kesalahpahaman dalam memahami permasalahan atau tema yang akan penulis bahas selanjutnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam judul **“STUDI TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015”** adalah sebagai berikut :

Studi : Penelitian ilmiah, Kajian, Telaah.
Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.

Dispensasi : Yang dimaksud dengan dispensasi adalah dispensasi atau pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama dalam

bentuk penetapan. Jadi, dispensasi disini adalah pengecualian penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Nikah di bawah umur : Pernikahan yang dilakukan pada usia 16 tahun

bagi wanita dan 19 tahun bagi pria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 pasal 1974 dan juga KHI pasal 15 ayat (1).⁸

Pengadilan Agama : Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan agama yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota.

Ambarawa : Ambarawa merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

⁸*Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 5

Tahun 2015 : Di sini yang dimaksud dengan tahun 2015 dalam judul Dispensasi Nikah dibawah Umur di Pengadilan Agama Ambarawa pada Tahun 2015 adalah penyusun memberikan batasan penelitian selama satu tahun terakhir supaya pembahasannya tidak meluas.

Maksud dari judul Studi Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015 di atas adalah penulis akan melakukan penelitian tentang alasan-alasan yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapannya selama tahun 2015 untuk mengabulkan dan menolak dispensasi nikah dibawah umur.

F. Metode Penelitian

Disini yang dimaksud dengan metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data dan metode analisa data.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah dengan menggunakan metode *Field Reseacrh* (Penelitian Lapangan) bersifat

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah* , Unissula Press, 2015, hlm. 29

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di Pengadilan Agama Ambarawa dan mengolah data secara baik dan benar.

Adapun sifat dari penelitian ini penyusun melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan suatu masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Ambarawa tersebut dengan mengemukakan dampak yang ada datanya dari obyek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi langsung terhadap pengumpul data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini sumber data primer adalah informasi atau data yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu berupa berkas-berkas penetapan dispensasi nikah yang berasal dari Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015 yang kemudian akan di analisa dan akan dikombinasikan dengan data yang lain.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bisa disusun dalam bentuk dokumen-dokumen maupun informasi lain yang mendukung pokok masalah. Dalam hal ini data sekunder berupa

teori tentang perkawinan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya juga informasi atau data lain yang terkait baik yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, brosur, laporan tulisan, dan lain-lain.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data dokumentasi adalah dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi yang terbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam pengumpulan data ini, digunakan untuk memperoleh data dari Pengadilan Agama Ambarawa yang mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah proses komunikasi atau interaksi menggunakan metode pengumpulan data/informasi dengan cara tanya jawab sepihak (antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian) yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹¹ Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hakim dan panitera

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.130

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 193

pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, diantaranya adalah penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi perkawinan.

4. Analisis Data

Untuk mencapai kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang terkumpul akan penyusun menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, penyusun akan menganalisis data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ambarawa, kemudian penyusun akan membahas secara terperinci masalah yang ada, sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui putusan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (outline) dalam skripsi dalam bentuk bab-bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian.

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG NIKAH DIBAWAH UMUR

Dalam Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, unsur pokok perkawinan, rukun dan syarat sah nikah, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, kriteria usia baligh pernikahan menurut fuqaha, batasan nikah dibawah umur, dan dispensasi perkawinan

BAB III : HASIL PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Ambarawa yang meliputi: sejarah, wilayah yuridiksi, struktur organisasi dan kewenangannya, alasan-alasan permohonan dispensasi serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2015

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
TENTANG DISPENSASI NIKAH TAHUN
2015**

Dalam bab ini berisi tentang analisis alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015 dan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan putusan dispensasi perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.